

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Permohonan praperadilan yang layak dikabulkan oleh hakim atas penangkapan dan penyitaan yang tidak sah menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu penyidik yang tidak melakukan ketentuan berdasarkan sahnya penangkapan yaitu :

- a. Dalam pasal 16 KUHAP menerangkan tentang kewenang melakukan penangkapan.
- b. Dalam pasal 17 KUHAP menerangkan tentang bukti permulaan.
- c. Dalam pasal 18 KUHAP menerangkan tentang pelaksanaan tugas penangkapan.
- d. Dalam pasal 19 KUHAP menerangkan tentang jangka waktu penangkapan.

Dan penyitaan yang sah harus memenuhi syarat :

- a. Dalam pasal 38 KUHAP menerangkan tentang penyitaan berdasarkan surat ijin pengadilan negeri setempat dan langkah yang harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
- b. Dalam pasal 39 KUHAP menerangkan tentang benda yang dapat disita.
- c. Dalam pasal 40 KUHAP menerangkan tentang hal tertangkap tangan.

- d. Dalam pasal 42 KUHAP menerangkan tentang penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya.
  - e. Dalam pasal 46 KUHAP menerangkan tentang pengembalian benda sitaan.
2. Hakim tidak mengabulkan praperadilan karena seharusnya yang mengajukan permohonan praperadilan yaitu pemilik langsung kendaraan tersebut, dalam perkara ini pemilik kendaraan yang ikut mengalami langsung bersama Pemohon dalam proses pemeriksaan kendaraan tersebut dan apabila pemilik kendaraan ingin menguasai kepada orang lain seharusnya disertai oleh surat kuasa. Adapun pemalsuan nomor tersebut apabila sudah jelas tidak ada indikasi tindak pidana seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya.
  3. Tidak dapat melakukan upaya hukum permohonan praperadilan yang tidak dikabulkan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf C PERMA No 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya penyidik melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan penyidik mencerminkan kepatuhan akan hukum, karena penyidik sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, bahwa dalam perkembangan praperadilan telah menjadi fungsi

kontrol Pengadilan terhadap jalannya peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan dan penyitaan.

2. Seharusnya yang mengajukan permohonan praperadilan yaitu pemilik langsung kendaraan tersebut, dalam perkara ini pemilik kendaraan yang ikut mengalami langsung bersama Pemohon dalam proses pemeriksaan kendaraan tersebut dan adapun pemilik kendaraan ingin menguasai kepada orang lain harusnya disertai oleh surat kuasa. Adapun pemalsuan nomor tersebut apabila sudah jelas tidak ada indikasi tindak pidana seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya dan adapun sanksi yang pantas didapatkan adalah tindakan penilangan berdasarkan Pasal 280 Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Karena Putusan Praperadilan tidak bisa dilakukan Upaya Hukum maka sebaiknya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana direvisi serta ditambahkan pasal-pasal yang menerangkan bahwa putusan praperadilan boleh dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.